

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**TRIWULAN IV
OKTOBER-DESEMBER
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Rencana Kerja	2

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian	4
1. Populasi dan Sampel	4
2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa	4
3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
4. Teknik Analisa Data.....	5
5. Tahapan Pelaksanaan	5

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden.....	8
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
2. Pekerjaan Responden	9
3. Domisili Responden	10
4. Kelompok Usia Responden	11
5. Layanan yang Digunakan	12
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	12
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	12
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	13
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	14
4. Indikator Transparansi Biaya.....	15
5. Indikator Biaya Tambahan.....	16
6. Indikator Hadiah, mendapat.....	17
7. Indikator Transparansi Pembayaran.....	18
8. Indikator Percaloan.....	19
9. Indikator Perbuatan Curang.....	20
10. Indikator Transaksi Rahasia.....	21
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	22

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	29
Rekomendasi.....	30
Pengantar Kuisisioner IPK.....	31

Lampiran

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB periode Oktober 2024 s/d Desember 2024. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta untuk memenuhi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 tanggal 13 April 2016 dan Nomor 608/DJU/PS02/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB.

Laporan hasil survei ini berisikan elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Laporan ini memberikan data dan informasi tentang tingkat Indeks Persepsi Anti Korupsi yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan utama pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 3 Januari 2025
Ketua Tim Survei



WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Pelaksana
- b. Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- c. Penyiapan Bahan
- d. Kuesioner.
- e. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- f. Kelengkapan peralatan.
- g. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- h. Jumlah Responden.
- i. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- j. Penyusunan Jadwal
- k. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengolahan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh Responden yang mendapatkan

penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya diolah untuk membuat laporan.

3. Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas Responden.

4. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam beberapa periode semester.

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan datang ke kantor dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu antara Oktober 2024 s/d Desember 2024. Selanjutnya data diolah untuk laporan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengawas (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan Responden, sekaligus memastikan

apakah Responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

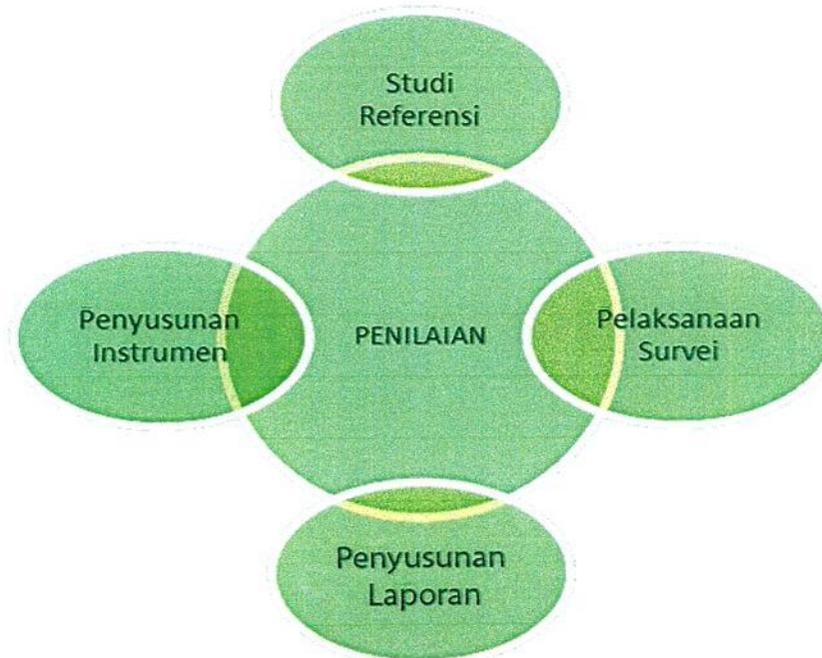
Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Pertama*, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

5. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1.
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2.
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3.
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

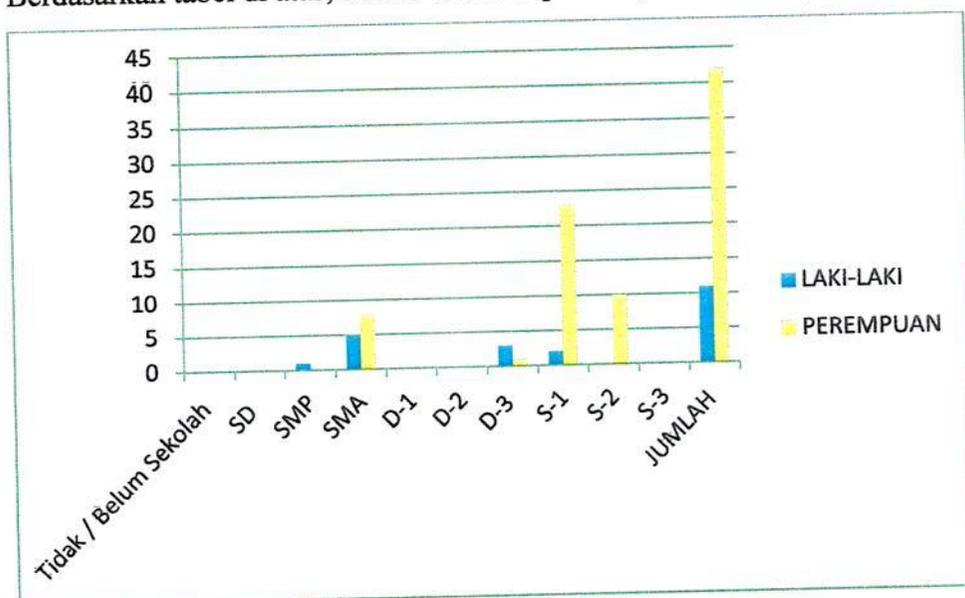
1. Tingkat pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan S-1 yaitu 25 responden (47,16%).

Tabel 4.
Tingkat pendidikan Responden

Pendidikan				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Tidak / Belum Sekolah	-	-	-
2	SD	-	-	-
3	SMP	1	-	1
4	SMU	5	8	13
5	D-1	-	-	-
6	D-2	-	-	-
7	D-3	3	1	4
8	S-1	2	23	25
9	S-2	-	10	10
10	S-3	-	-	-
JUMLAH		11	42	53

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



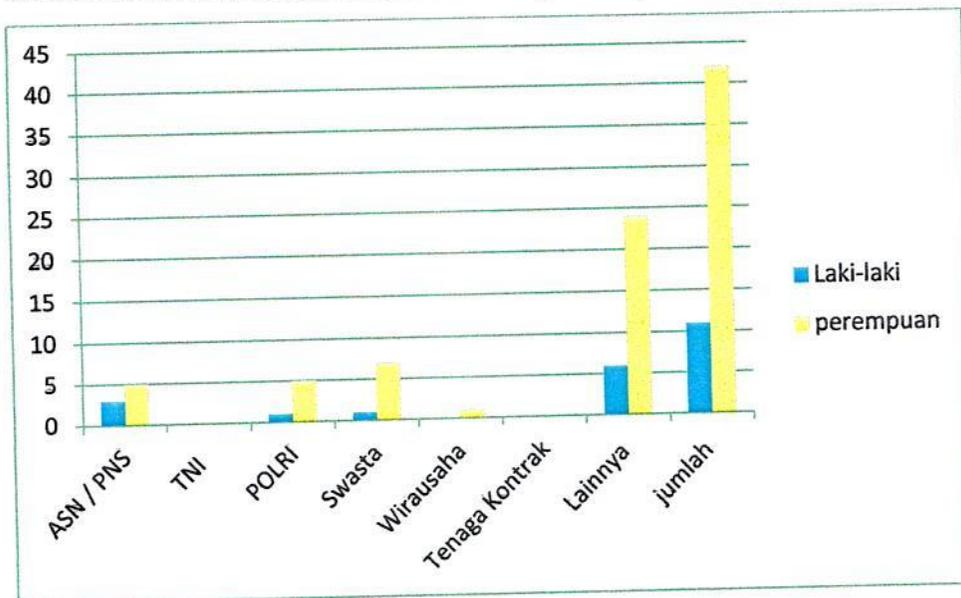
2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan Responden, menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 30 Responden (56,60%) pengguna layanan teridentifikasi berprofesi lainnya.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	ASN / PNS	3	5	8
2	TNI	-	-	0
3	POLRI	1	5	6
4	Swasta	1	7	8
5	Wirausaha	-	1	1
6	Tenaga Kontrak	-	-	-
7	Lainnya	6	24	30
JUMLAH		11	42	53

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



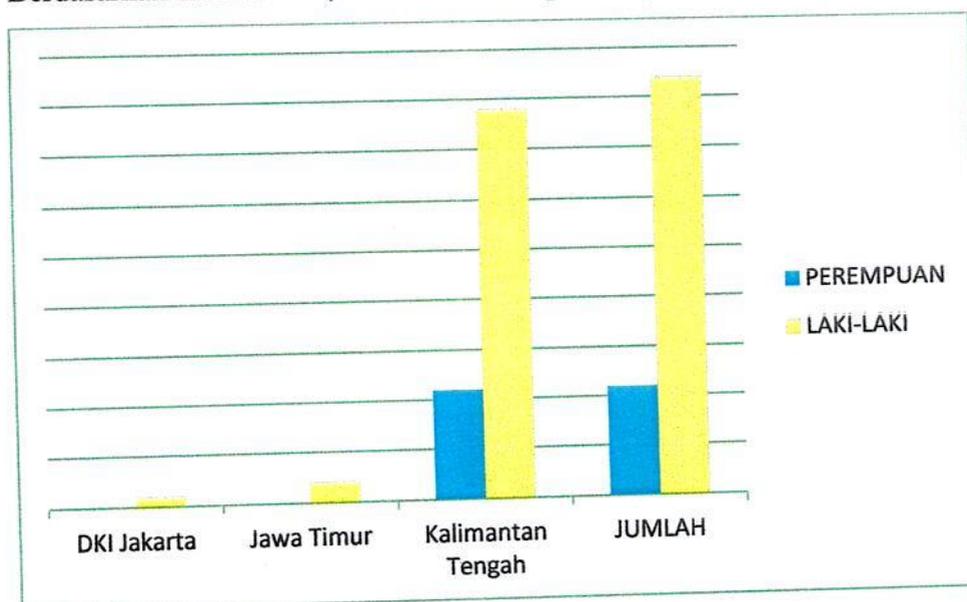
3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, Responden paling banyak berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 50 Responden (94,33%).

Tabel 6.
Domisili Responden

Domisili				
NO.	DOMISILI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	DKI Jakarta	-	1	1
2	Jawa Timur	-	2	2
3	Kalimantan Tengah	11	39	50
JUMLAH		11	42	53

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



4. Kelompok Usia Responden

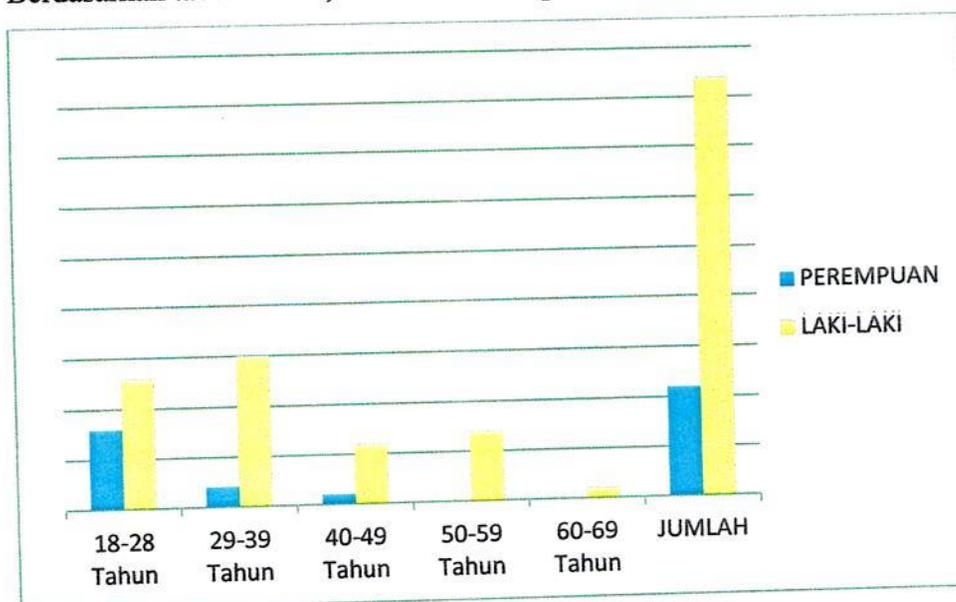
Sementara itu jika melihat Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 18 s/d 28 tahun dengan jumlah Responden sebanyak 21 Responden (39,62 %).

Tabel 7.
Usia Responden

Pekerjaan

NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	18 s/d 28 Tahun	8	13	21
2	29 s/d 39 Tahun	2	15	17
3	40 s/d 49 Tahun	1	6	7
4	50 s/d 59 Tahun	-	7	7
5	60 s/d 69 Tahun	-	1	1
JUMLAH		11	42	53

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



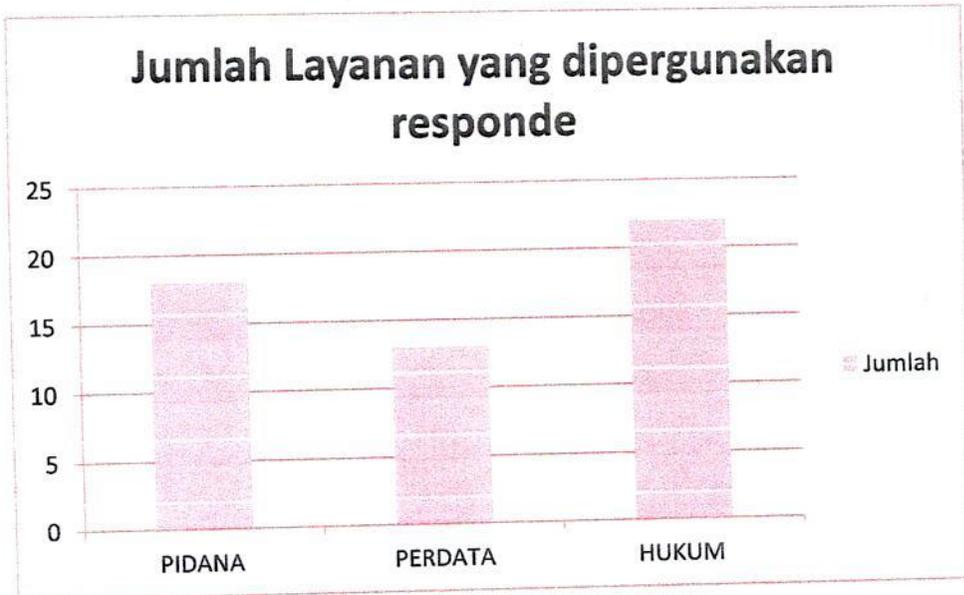
5. Layanan yang digunakan

Layanan Hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh Responden, yaitu sebanyak 22 Responden (41,50 %).

Tabel 8.
Jenis Layanan yang Dipergunakan Responden

JENIS LAYANAN				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Perdata	4	9	13
2	Pidana	2	16	18
3	Hukum	5	17	22
JUMLAH		11	42	53

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang, yang keseluruhannya menilai petugas melayani sesuai prosedur yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak ada	4	53	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa menyalahgunakan jabatan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.
Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tanpa Meminta Imbalan	4	53	100
2	Jarang / Pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0

4	selalu	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3. Indikator Menjual Pengaruh

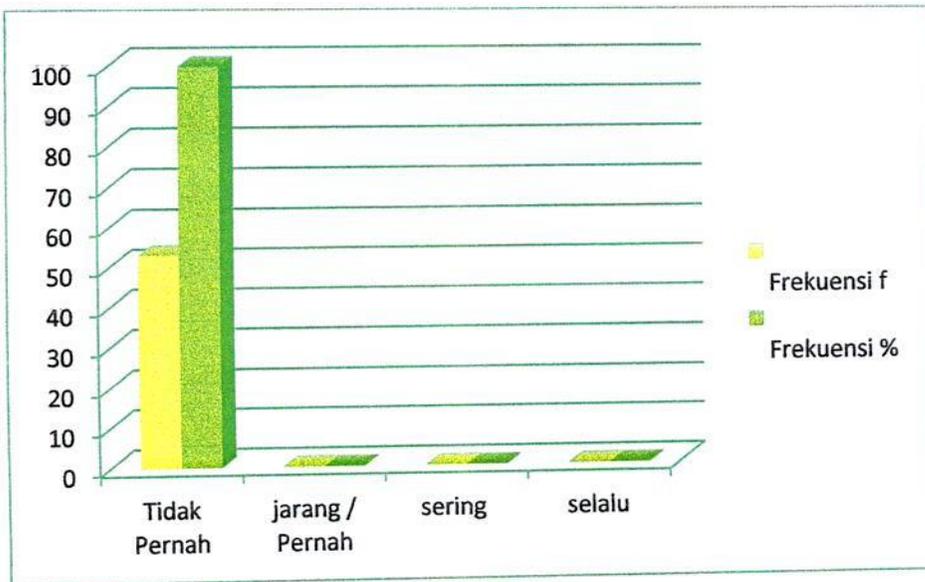
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tanpa menjual pengaruh. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	53	100
2	jarang / Pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,962 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang yang keseluruhannya menilai petugas. Transparan dalam menjelaskan biaya perkara. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dalam hal tarif dan biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	51	96,22
2	sering	3	2	3,77
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



5. Indikator Biaya Tambahan

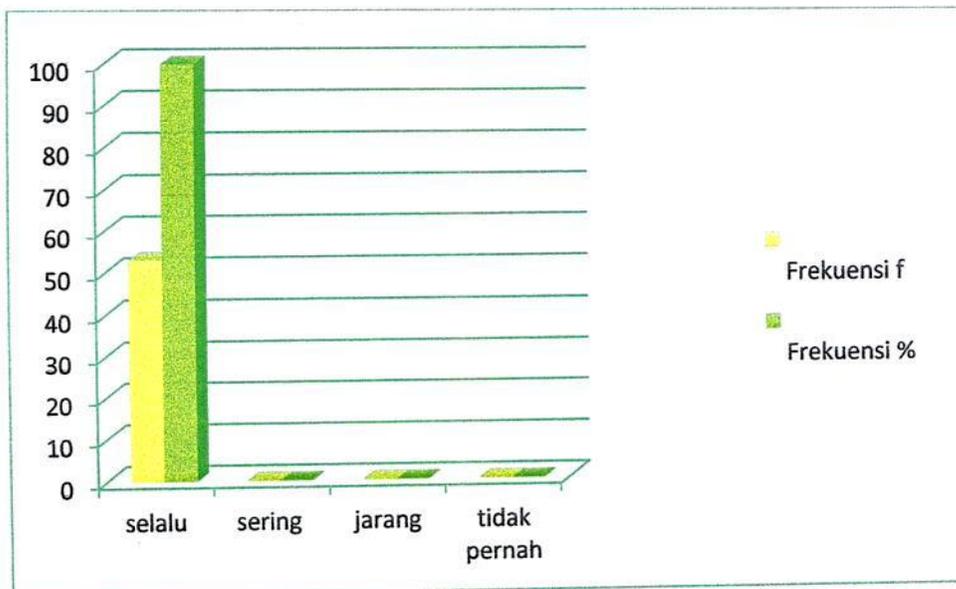
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang yang keseluruhannya menilai petugas dalam melayani tanpa meminta biaya tambahan yang sifatnya tidak resmi. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari biaya tambahan/pungli.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	53	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



6. Indikator Hadiah

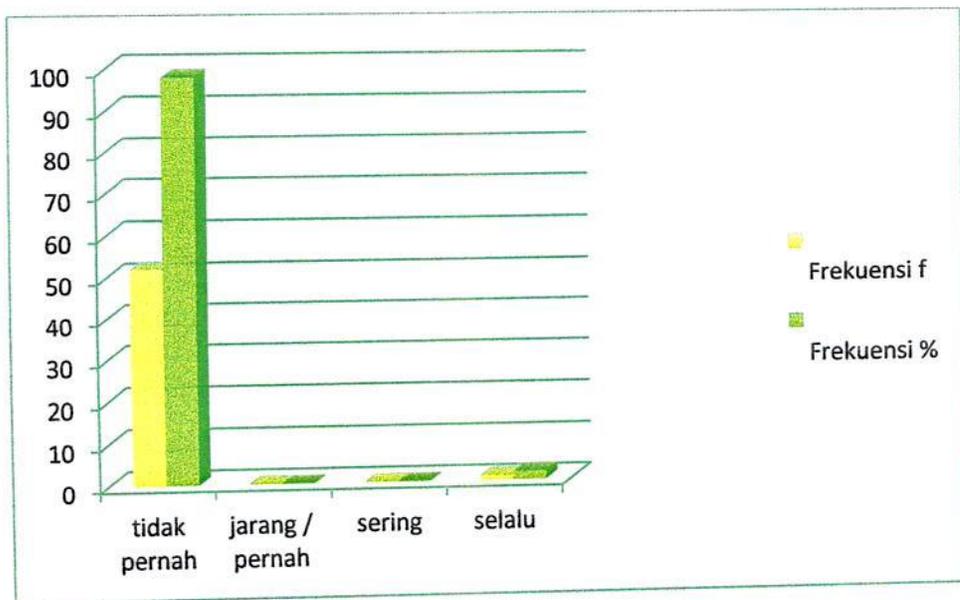
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,943 dengan jumlah Responden sebanyak 54 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa meminta hadiah. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih karena tidak menerima hadiah yang tidak sah.

Tabel 14.

Indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	52	98,11
2	jarang / pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	1	1,88
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



7. Indikator Transparansi Pembayaran

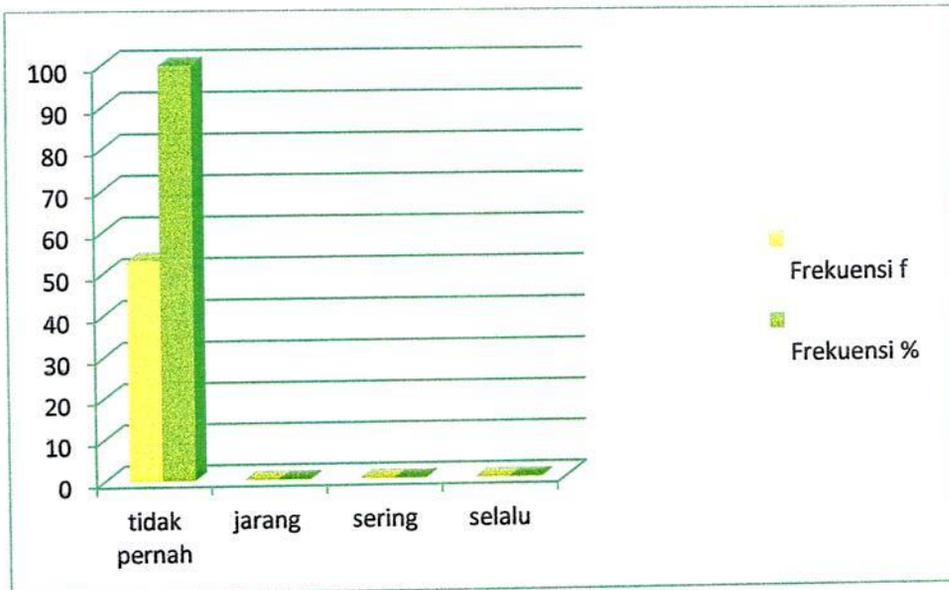
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu memberikan bukti pembayaran yang sah.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	53	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



8. Indikator Percaloan

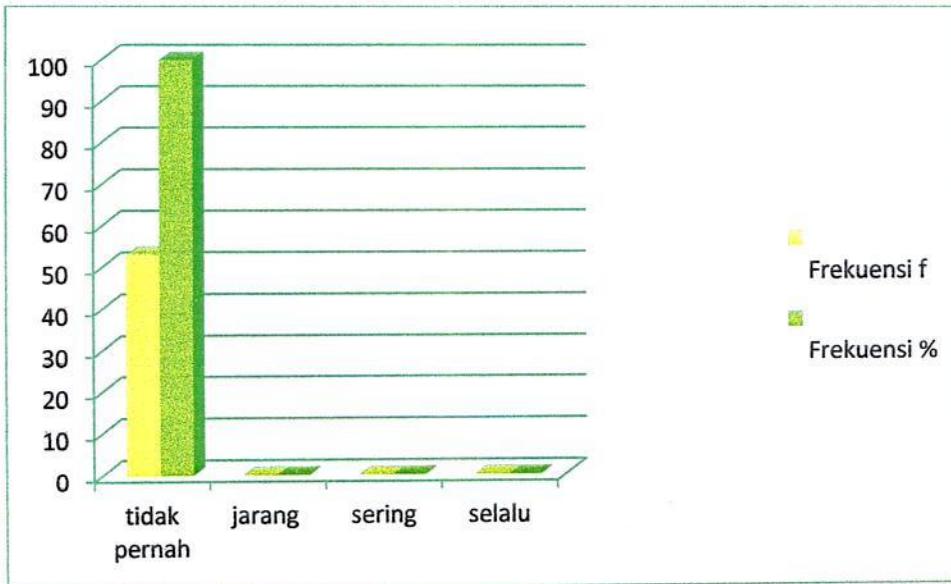
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada praktek percaloan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dan bersih dari praktik percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	53	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



9. Indikator Perbuatan Curang

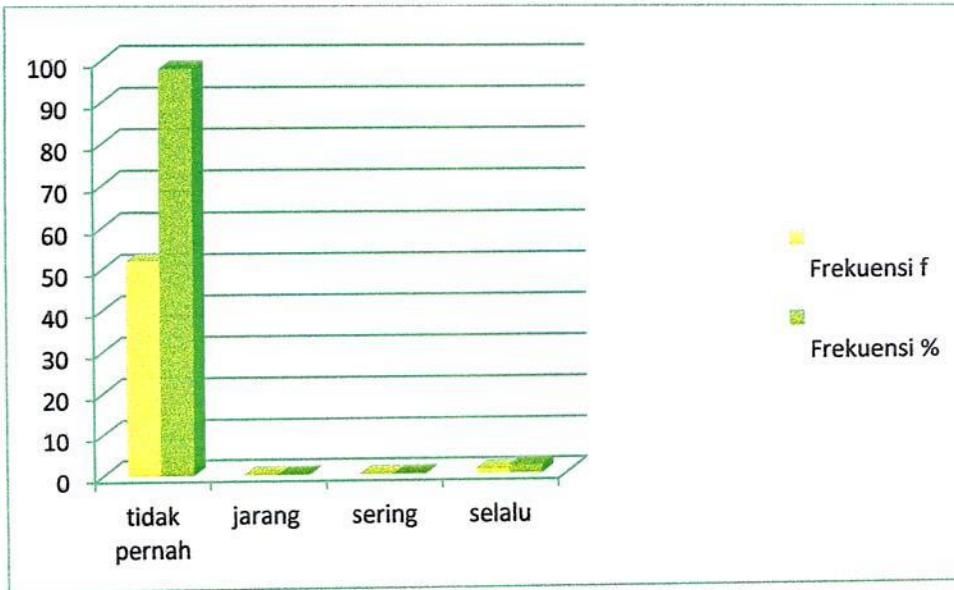
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 3,943 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada perbuatan curang. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak terdapat perbuatan curang kearah KKN.

Tabel 17.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	52	98,11
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	1	1,88
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



10. Indikator Transaksi Rahasia

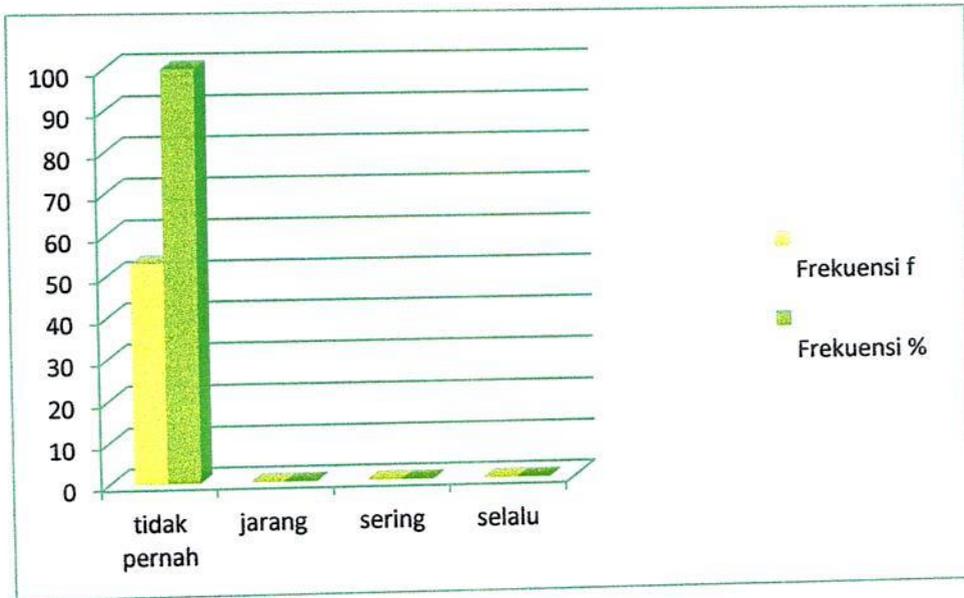
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 53 Orang menilai bahwa pelayanan tanpa adanya transaksi rahasia. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari praktik pengurusan perkara.

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	53	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			53	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



C. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar **3,98**. Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,62 %**.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk

meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Tetap Meningkatkan Pelayanan untuk masyarakat
2	Agar lebih ditingkatkan 3S
3	Tetap tingkatkan kebersihan
4	Ruang tunggu sidang dan PTSP agar lebih nyaman
5	Tingkatkan pelayanan administrasinya

Data Responden

No	Nama/Kode Respon	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	M.H. R-099134-IPAK- 452941AB60 No. HP 85231476862	JAWA TIMUR	30 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Desember 2024
2	Kesuma, SH R-099134-IPAK- B95019ACC1 No. HP 85248895773	KALIMANTAN TENGAH	50 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Desember 2024
3	S.H R-099134-IPAK- 5AAC4182DC No. HP 81349299345	KALIMANTAN TENGAH	55 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Desember 2024
4	Pratama R-099134-IPAK- E06E9A97BC No. HP 85648688719	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Desember 2024
5	Rahmadi Hutagalung R-099134-IPAK- B808D39313 No. HP 82354899932	KALIMANTAN TENGAH	30 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Desember 2024
6	Abdul Syukur, S.H R-099134-IPAK- 550126E9E5 No. HP 811524956	KALIMANTAN TENGAH	50 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Desember 2024
7	Imam Heri Susila, S.H R-099134-IPAK- 0969DD752C No. HP 81250505506	KALIMANTAN TENGAH	40 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Desember 2024
8	Alen Maskuri R-099134-IPAK- F27ACA66E4 No. HP 81213119103	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16 Desember 2024
9	Lina Rosa R-099134-IPAK- A608DD0FC2 No. HP 85350537415	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Perempuan	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16 Desember 2024
10	Sutejo, S.H., M.H R-099134-IPAK- F6CC331CAD No. HP 81226067651	KALIMANTAN TENGAH	30 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Desember 2024
11	M.Kn R-099134-IPAK- 5EB45A3EDE No. HP 8567001049	KALIMANTAN TENGAH	40 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Desember 2024
12	Tarmilah R-099134-IPAK- 9199E2A1F3 No. HP 82183339177	KALIMANTAN TENGAH	33 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	11 Desember 2024
13	Dyah Aulia Poetry R-099134-IPAK- EE2ABAED0D No. HP 82352780089	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Perempuan	Diploma 3LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Desember 2024
14	Chori Nur Aziza R-099134-IPAK- F117B39D4D No. HP 89649008170	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Perempuan	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Desember 2024
15	Cristian Nibel R-099134-IPAK- 6380BC366F No. HP 85348506131	KALIMANTAN TENGAH	33 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2024
16	Ahmad Zahroni R-099134-IPAK- 7EC114F31D No. HP 1345871920	KALIMANTAN TENGAH	38 Tahun Laki-laki	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	25 November 2024
17	Dyah Aulia Poetry R-099134-IPAK- 9BE1F04AC5 No. HP 82352780089	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Perempuan	Diploma 3LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 November 2024

18	Dilan Jaya tama Putra R-099134-IPAK-71452E5F44 No. HP 82284712146	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 November 2024
19	Sutejo, S.H., M.H R-099134-IPAK-79F14D1E5A No. HP 81226067651	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 November 2024
20	S.H R-099134-IPAK-741D97C04E No. HP 81349299345	KALIMANTAN TENGAH	55 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 November 2024
21	Suryani R-099134-IPAK-4A7CF5B30D No. HP 82352779180	KALIMANTAN TENGAH	41 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 November 2024
22	Chori Nur Aziza R-099134-IPAK-B1A068BFB7 No. HP 89649008170	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Perempuan	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 November 2024
23	Cristian Nibel R-099134-IPAK-4C82F05B82 No. HP 85348506131	KALIMANTAN TENGAH	33 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 November 2024
24	Abdul Hamit R-099134-IPAK-84441F3155 No. HP 85751178888	KALIMANTAN TENGAH	60 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 November 2024
25	Wibowo Tri Laksono, S.H R-099134-IPAK-5DAC82B343 No. HP 8534856333	KALIMANTAN TENGAH	31 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45607
26	Rendy Candra Prasetya R-099134-IPAK-4FD0ACB296 No. HP 85350531150	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 November 2024
27	M.Kn R-099134-IPAK-B5FCEF13FC No. HP 82138000049	KALIMANTAN TENGAH	40 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 November 2024
28	Fahmirian Noor, SH MH R-099134-IPAK-88A829E963	KALIMANTAN TENGAH	31 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 November 2024
29	Rotama, S.H R-099134-IPAK-83705C1D6C No. HP 81318150416	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	11 November 2024
30	Pratama R-099134-IPAK-DF323EDBA7 No. HP 85648688719	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 November 2024
31	Muhammad Nur R-099134-IPAK-27D74145E6 No. HP 87722182115	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 November 2024
32	Herman Peta R-099134-IPAK-A416DFC314 No. HP 85754505352	KALIMANTAN TENGAH	31 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 November 2024
33	Yeni Arsih R-099134-IPAK-D933A8DF64 No. HP 81520924229	KALIMANTAN TENGAH	26 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 November 2024
34	Fahmirian Noor, SH MH R-099134-IPAK-C225E3253C	KALIMANTAN TENGAH	32 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 November 2024
35	S.H R-099134-IPAK-5D6B217B30 No. HP 81348338515	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 November 2024

36	Ramdhani Effendi R-099134-IPAK- 069BD382CC No. HP 85249695189	KALIMANTAN TENGAH	35 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	31 Oktober 2024
37	S.Far., Apt R-099134-IPAK- 8A32404E03 No. HP 8115233060	KALIMANTAN TENGAH	37 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Oktober 2024
38	Widodo R-099134-IPAK- BDEA36BD3F No. HP 81348363535	KALIMANTAN TENGAH	58 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Oktober 2024
39	Dyah Aulia Poetry R-099134-IPAK- 0BC61F88B1 No. HP 82352780089	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Perempuan	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Oktober 2024
40	Fery Gunawan R-099134-IPAK- EE265B75BA No. HP 82244488880	KALIMANTAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Oktober 2024
41	Moh Ricky Sulaiman R-099134-IPAK- B18AD2E0F4 No. HP 85386652588	KALIMANTAN TENGAH	48 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Oktober 2024
42	Limahardja, Ak, CA, S.H. R-099134-IPAK- B48E0A0768	JAWA TIMUR	58 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Oktober 2024
43	Fadhol T R-099134-IPAK- AC5E69EFBA No. HP 81251761235	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Oktober 2024
44	Chori Nur Aziza R-099134-IPAK- 1B4E489795 No. HP 89649008170	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Oktober 2024
45	Prasetya R-099134-IPAK- B654EBFEC1 No. HP 85350531150	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Oktober 2024
46	Eko Budianto R-099134-IPAK- BASE922017 No. HP 85319077472	DKI JAKARTA	40 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Oktober 2024
47	Pratama R-099134-IPAK- 3778A88343 No. HP 85648688719	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Oktober 2024
48	Fazhari, S.H R-099134-IPAK- 69D61E48EA No. HP 85392350095	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Oktober 2024
49	Rizki R-099134-IPAK- 3D5616EA0D No. HP 82299253965	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	8 Oktober 2024
50	I Made Arya Saputra R-099134-IPAK- 6585B247CA No. HP 85142830066	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Oktober 2024
51	Rahmat Hidayat R-099134-IPAK- 2AE92F7E28 No. HP 81378228511	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	Diploma 3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Oktober 2024
52	Fahmirian Noor R-099134-IPAK- BE265E2448 No. HP 82155380850	KALIMANTAN TENGAH	31 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Oktober 2024
53	Gusti Muhammad Andre R-099134-IPAK- 98EED67069 No. HP 81256140209	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Laki-laki	S2SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Oktober 2024

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

IPAK : Indeks Persepsi Anti Korupsi

*) : Jumlah NRR IPAK Tertimbang

NRR Per RL : Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

IPAK : 3,98

Jumlah Responden 53

Bobot

Unsur Pertanyaan

Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Rangking Terendah & Tertinggi
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,000	
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	
Q 3	Menjual Pengaruh	4,000	
Q 4	Transaksi Biaya	3,962	
Q 5	Biaya Tambahan	4,000	
Q 6	Hadiah	3,943	

Q 7	Tranparansi Biaya	4,000	
Q 8	Percaloan	4,000	
Q 9	Perbuatan Curang	3,943	
Q 10	Transaksi Rahasia	4,000	
JUMLAH		39, 8	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 3,98 atau pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun yang digunakan untuk perangkaan ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Berdasarkan Data Yang Dirangkum Untuk Survei Triwulan IV Tahun 2024 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, dimana indeks persepsi anti korupsi sebelumnya sebesar 4,00 atau bila dikonversikan sebesar 100%.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,962.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,943.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,943.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000.

Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kelas IB, berdasarkan peringkat ruang lingkungannya, terdapat 3 nilai terendah dari hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi triwulan IV Tahun 2024 yaitu:

1. Indikator Transparansi Biaya, dengan nilai rata-rata per unsur 3,962;
2. Indikator Hadiah, dengan nilai rata-rata per unsur 3,943;
3. Indikator Perbuatan Curang, dengan nilai rata-rata per unsur 3,943;

B. Rekomendasi

Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Oktober s/d Desember 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh peningkatan penilaian dari masyarakat dengan nilai 3,98 atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Terkait dengan ketiga nilai terendah dalam survey Indeks Persepsi Anti Korupsi perlu dilakukan evaluasi guna memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga diharapkan nilai terendah pada Triwulan ini dapat ditingkatkan, antara lain :

1. Transaksi Biaya

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir untuk selalu melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan;

2. Hadiah

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak menerima/meminta hadiah dari pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan.

3. Perbuatan Curang

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selalu menjaga integritas serta bersikap objektif serta tidak melakukan perbuatan curang dalam menjalankan pekerjaan.



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun

Telepon : (0532) 21014 – 21179 Kode Pos 74111

Website: www.pn.pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

**SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Nomor : W17/01/PB.01/I/2025

Para Pengguna Pengadilan yang terhormat,

Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna pengadilan sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Pangkalan Bun “PRIMA” Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel untuk mewujudkan institusi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mengetahui kondisi riil pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini terkait dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadakan Survei Persepsi Korupsi dengan melibatkan para pengguna pengadilan sebagai Responden. Mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr(i) para pengguna pengadilan berkenan mengisi kuesioner yang kami edarkan dengan sejujurnya dan apa adanya. Jawaban Bapak/ibu atas pertanyaan di dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 3 Januari 2025
Koordinator Survei


WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Dasar Hukum:

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korups

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama : Dimas Edi Trianto
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama : Hariyanto
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama : Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jl. Sutan Syahrir No. 16 KAB. KOTAWARINGIN BARAT
KALIMANTAN TENGAH

<http://www.pn-pangkalanbun.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,62%

Jumlah	53 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 42 PEREMPUAN : 11
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 4 SMP : 1 S1 : 25 SMU : 13 S2 : 10 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 8 SWASTA : 8 TNI : 0 WIRUSAHA : 1 POLRI : 6 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 30

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,943
2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,943
3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,962

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.1. Transaksi Biaya

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir untuk selalu melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan;

2. Hadiah

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak menerima/meminta hadiah dari pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan.

3. Perbuatan Curang

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selalu menjaga integritas serta bersikap objektif serta tidak melakukan

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2024
 IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama :(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan :
3. Umur (Tahun) :
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
5. Pendidikan terakhir :
 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
 2. SD 6. Sarjana (S1)
 3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
 4. SLTA
5. Pekerjaan Utama :
 1. PNS 5. Petani/Nelayan
 2. TNI/Polri 6. Pedagang
 3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
 4. Wiraswasta 8. Lainnya
6. Domisili/Tempat Tinggal :
7. Jenis Layanan yang Digunakan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
 Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

Kuisisioner IPK :

No	Pertanyaan	Jawaban	Nilai
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak Sesuai Prosedur b. Jarang Sesuai Prosedur c. Sering Sesuai Prosedur d. Selalu Sesuai Prosedur	1 2 3 4
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan	1 2 3 4
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4

5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4

Berdasarkan Survey Elektronik yang digunakan pada periode 01 Juli 2024 s/d 30 September 2024
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Pangkalan Bun, 02 Januari 2025

Nomor : /KPN.W16-U3/UND.HK1.2.1/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Penyampaian Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode Oktober 2024-Desember 2024

Yth.

1. Ketua
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Koordinator Tim Survei
5. Tim Suvei

di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode Oktober 2024-Desember 2024, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Jumat, 03 Januari 2025
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Acara : Rapat Penyampaian Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode Oktober 2024-Desember 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun,



Wilana Anggara Putra



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Januari 2025
Waktu : 13.30-Selesai
Agenda : Monev Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK
Periode Oktober 2024 – Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum..	HAKIM	
2	FIRMANSYAH, S.H., M.H	HAKIM	
3	HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.	PANITERA	
4	HARIYANTO	PANMUD HUKUM	
5	WAHYUDI, S.H.	PANMUD PERDATA	
6	MASRIANOR, S.H.	PANMUD PIDANA	
7	MAYA AGUSTINA, S.H.	PP	
8	BAYU SISTIAWAN, A.Md., S.H.	PP	
9	DIMAS EDI TRIANTO	CPNS	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

- Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Hari : Jumat
- Tanggal : 3 Januari 2025
- Pukul : 13.30 WIB
- Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Acara : Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode Oktober 2024 – Desember 2024
- Peserta Rapat :
1. Ketua
2. Seluruh Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Koordinator Tim Survei
6. Tim Suvei

Jalannya Rapat :

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Predikat yang diperoleh dari berbagai ruang lingkup penilaian survey IKM dan IPAK tersebut merupakan cerminan pelayanan yang telah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berikan kepada Masyarakat dan Instansi Pemerintahan Terkait. Merespon penilaian itu, terhadap tiga indikator dengan predikat tertinggi untuk selalu dijaga bahkan ditingkatkan sedangkan terkhusus untuk tiga indikator dengan predikat terendah agar dilakukan koreksi walaupun sebenarnya predikat yang diberikan masih dalam kategori sangat baik;

(Laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain)

Terkait dengan ketiga nilai terendah dalam survey Indeks Persepsi Anti Korupsi perlu dilakukan evaluasi guna memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga diharapkan nilai terendah pada Triwulan ini dapat ditingkatkan, antara lain :

1. Transaksi Biaya

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir untuk selalu melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan;

2. Hadiah

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak menerima/meminta hadiah dari pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan.

3. Perbuatan Curang

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selalu menjaga integritas serta bersikap objektif serta tidak melakukan perbuatan curang dalam menjalankan pekerjaan.

(Ketidaksesuaian)

NIHIL

(Rekomendasi atas ketidaksesuaian)

NIHIL

Nama Notulis,



Dimas Edi Trianto

NIP. 19992106 2024051 001

Mengetahui,

Plh. Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,



Widana Anggara Putra

NIP. 198809272011011005



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DOKUMENTASI



LAPORAN TINDAK LANJUT

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
TRIWULAN IV TAHUN 2024
OKTOBER s/d DESEMBER**

A. HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB.

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 3,98 atau pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun yang digunakan untuk perangkingan ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,962.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,943.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,943.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan Data Yang Dirangkum Untuk Survei Triwulan IV Tahun 2024 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, dimana indeks persepsi anti korupsi sebelumnya sebesar 4,00 atau bila dikonversikan sebesar 100%. Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Oktober s/d Desember 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh peningkatan penilaian.

Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

C. TINDAK LANJUT DARI HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI.

Terkait dengan ketiga nilai terendah dalam survey Indeks Persepsi Anti Korupsi perlu dilakukan evaluasi guna memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga diharapkan nilai terendah pada Triwulan ini dapat ditingkatkan, antara lain :

1. Transaksi Biaya

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir untuk selalu melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan;

2. Hadiah

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak menerima/meminta hadiah dari pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan.

3. Perbuatan Curang

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selalu menjaga integritas serta bersikap objektif serta tidak melakukan perbuatan curang dalam menjalankan pekerjaan.

**PLH. KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.